

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Modernisasi memberikan opsi lebih banyak dalam hal hiburan bagi masyarakat. Salah satu hiburan masyarakat modern yang paling fenomenal adalah bioskop. Hiburan ini mempertunjukkan gambar bergerak yang disebut film, yang dianggap sebagai media paling hebat yang pernah diciptakan oleh kecerdasan manusia.¹ Secara harfiah, bioskop (*bioscoop* dalam bahasa Belanda) berarti “gambar idoeop”.² Sesuai dengan namanya, bioskop telah memperlihatkan kemajuan luar biasa karena dapat menyajikan gambar menjadi hidup, bergerak, bercerita bahkan berbicara.

Bioskop pertama kali muncul di Hindia Belanda melalui pertunjukan film yang berpindah-pindah dari kota ke kota pada akhir abad ke-19.³ Keadaan ini kurang menyenangkan bagi masyarakat karena hiburan yang kerap berpindah tempat tersebut tidak dapat dinikmati selamanya. Maka dibangunlah gedung untuk pertunjukan bioskop secara permanen. Lambat laun, *bioscoop* sebagai “gambar idoeop” mengalami perubahan makna menjadi “tempat diputarnya gambar idoeop”.⁴ Gedung bioskop pertama di Hindia Belanda itu berdiri di Batavia pada akhir tahun

¹ Danesi, Marcel. *Pesan Tanda dan Makna: Buku Teks Dasar. Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi*. (Yogyakarta: Jalasutra, 2010).

² M. Sarif Arief, *Politik Film di Hindia Belanda*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hal.2

³ Dafna Ruppin, *The Komedi Bioscoop: The Emergence of Movie-going in Colonial Indonesia 1896-1914*, Disertasi, (Universiteit Utrecht, 2015)

⁴ Misbach Yusa Biran, *Sejarah Film 1900-1950*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hal.11

1900. Kemudian segera setelahnya, kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Bandung hingga Jember mulai mengikuti kemajuan ini.

Bioskop pertama di Jember adalah *Royal Standard Bioscoop* yang berdiri pada tahun 1913.⁵ Keberadaan Royal Standard Bioscoop di Jember menunjukkan bahwa Jember pada masa itu termasuk kota yang besar dan maju. Adanya bioskop di suatu wilayah, seperti Jember tersebut, menunjukkan bahwa wilayah itu telah mencapai kehidupan modern dan setara dengan kota-kota metropolis di Eropa.⁶ Jember memang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang paling pesat pertumbuhannya di abad ke-20.⁷ Dalam waktu kurang dari satu abad, wilayah yang dahulunya berupa hutan dan rawa itu, bertransformasi menjadi kota perkebunan yang ramai. Beragam infrastruktur modern dibangun guna menyokong aktivitas perkebunan di Jember, seperti pabrik dan jalur kereta api. Modernisasi di Jember tersebut tentunya menarik minat banyak pendatang baik dari etnis lokal maupun etnis Eropa dan Timur Asing. Pada tahun 1930-1970 pertumbuhan penduduk Jember mengalami pertambahan dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya.⁸ Jember muncul sebagai salah satu dari empat kota besar di Jawa Timur, setelah ibukota Surabaya, dan dua kota lainnya, Malang dan Kediri.⁹ Peningkatan jumlah penduduk sering kali seiring dengan bertambahnya kebutuhan

⁵ “Uit Loemadjang”, *Bataviaasch Nieuwsblad*, (22 November 1913)

⁶ Dafna Ruppin, 2015, *op.cit.*, hal. 287

⁷ Nurhadi Sasmita, *Historia*, “Menjadi Kota Definitif : Jember Abad 19-20”, 1(2) 2019, pp. 116-137

⁸ Nawiyanto, *Naditira Widya*, “Migrasi Perluasan Frontier Pemukiman, dan Perubahan Demografis: Karesidenan Besuki 1870-1970”, 3(1) 2009, pp. 121-132 – Balai Arkeologi Banjarmasin

⁹ *Ibid.*

konsumsi hiburan. Dengan demikian Jember menjadi kota yang potensial untuk kesuksesan bisnis hiburan seperti bioskop.

Perpindahan kekuasaan dari Hindia Belanda ke Jepang turut mempengaruhi perjalanan sejarah bioskop di Jember. Bioskop yang semula dikelola oleh orang-orang Eropa harus berhenti beroperasi pada masa pendudukan Jepang lantaran pemiliknya telah pergi dari Indonesia. Situasi perang dan kekalahan Belanda terhadap Jepang tidak memungkinkan mereka untuk tetap melanjutkan bisnisnya. Gedung-gedung bioskop milik Belanda itu pun dikuasai Jepang. Bisnis bioskop tidak dapat berkembang karena pertunjukan film berada sepenuhnya dalam kontrol badan propaganda Jepang.¹⁰ Bioskop seperti mati suri sampai dengan pasca kemerdekaan. Kemudian bioskop kembali bangkit pada dekade 1950-an hingga 1960-an. Beberapa bioskop tersebut menempati bekas gedung bioskop pada masa Hindia Belanda yang terbengkalai. Usaha tersebut pun tidak lagi dikelola oleh orang Belanda melainkan oleh orang Tionghoa.

Popularitas bioskop di Jember terus meningkat pada dekade selanjutnya. Hal tersebut dibuktikan dengan penambahan jumlah bioskop pada dekade 1970-an hingga 1980-an, yang semula berjumlah delapan buah bioskop menjadi dua belas bioskop. Keberadaan bioskop yang tersebar di berbagai tempat menjadi alternatif baru hiburan rakyat Jember selain pertunjukan tradisional dan pasar malam.¹¹ Daya tarik bioskop sebagai hiburan cukup tinggi dalam berbagai kalangan masyarakat, dari ekonomi menengah sampai ekonomi atas, dari anak-anak,

¹⁰ Aiko Kurasawa, "Propaganda Media on Java Under The Japanese 1942-1945", *Indonesia*, No. 44 (Oct., 1987), pp. 59-116

¹¹ Wawancara Aslan (60 tahun), pada tanggal 1 Oktober 2021 di Kencong

remaja, hingga dewasa.¹² Hiburan bioskop yang selama ini diklaim sebagai milik orang kota, sudah mulai masuk hingga ke desa-desa.¹³ Sejak awal dekade 1970-an, bioskop tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kota Jember, melainkan juga mereka yang tinggal di desa.

Keberadaan dua jenis bioskop yang berdasarkan lokasinya ini, kota dan desa menunjukkan bahwa modernisasi hiburan tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi juga di perdesaan. Karakteristik masyarakat yang berbeda antara mereka yang tinggal di perkotaan dan perdesaan dapat memperlihatkan pula perbedaan bioskop dan kebudayaan di dalamnya. Bioskop-bioskop di perkotaan memiliki kelas-kelas yang membedakan golongan status sosial penontonnya melalui film yang diputar, harga karcis dan fasilitas lainnya. Sementara hal tersebut tidak berlaku bagi bioskop desa. Bioskop desa dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Dalam hal suasana saat pertunjukan, bioskop gedung dan bioskop non-gedung pun hampir tidak ada bedanya, selain bangunannya saja. Suasana di dalam kedua jenis bioskop tersebut berisik, banyak penjaja makanan dan minuman serta banyak sampah berserakan.¹⁴

Bioskop desa menarik untuk menjadi topik kajian penelitian karena selama ini kajian-kajian mengenai bioskop lebih banyak diwakilkan oleh bioskop kota. Keberadaan bioskop desa di Jember dapat diduga bahwa kabupaten ini

¹² Victor. C. Mambor, *Satu Abad Gambar Idoep di Indonesia*, (Jakarta: Sinematek Indonesia, 2000), hal. 1

¹³ *Film Majalah*, "Perbioskopian Indonesia Menyambut 50th Indonesia Merdeka: Makin Menyusut, Makin Menguncup", Vol. 236-246, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Media Audio Visual, 1995), hlm. 18

¹⁴ Wawancara Sunaryanto (63 tahun) pada tanggal 30 April 2022 di Kasiyan Timur

memiliki nilai pertumbuhan bioskop yang sangat baik. Statistik bioskop yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa Jember memang memiliki jumlah bioskop yang cukup banyak dibanding dengan kabupaten lain di Jawa Timur.¹⁵ Bahkan dibanding dengan Malang yang notabene merupakan kota yang besar, jumlah bioskop Jember tercatat lebih banyak terutama pada dekade 1980-an. Banyaknya jumlah bioskop di Jember disumbang sebagian besar oleh bioskop desa. Berdasar statistik tersebut, 6 banding 4 bioskop di Jember tersebar di wilayah desa dibanding kota. Rata-rata bioskop desa berada di sekitar wilayah perkebunan, mengingat latar belakang Jember merupakan wilayah perkebunan. Bioskop Kirana di Kencong, bioskop Candra di Semboro, bioskop Jaya di Kalisat, adalah beberapa contoh bioskop di wilayah desa.

Memasuki dekade 1990-an, perkembangan bioskop di Jember mengalami antiklimaks. Jumlah bioskop baik gedung maupun layar tancap, baik yang di kota maupun di desa mengalami penurunan yang signifikan. Kondisi tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki televisi dan adanya tempat persewaan kaset video. Tayangan televisi dianggap lebih menarik karena lebih variatif. Persewaan kaset video juga menawarkan tontonan yang lebih beragam dan dapat dinikmati tanpa harus jauh-jauh ke bioskop. Sementara bioskop di Jember kebanyakan tidak banyak memberikan variasi film baru. Sayangnya, bioskop yang kehilangan penonton itu masih dianggap barang mewah oleh pemerintah sehingga beban pajak yang harus dibayarkan oleh bioskop masih

¹⁵ Biro Pusat Statistik, *Daftar Nama dan Alamat bioskop di Indonesia*, 1985, hlm. 34

sangat tinggi.¹⁶ Pendapatan perusahaan bioskop tidak dapat menutup besarnya biaya yang dikeluarkan seperti pajak, sewa, upah pegawai, biaya perbaikan kerusakan, dan lain-lain. Akhirnya, secara berangsur-angsur perusahaan bioskop di Jember pun terpaksa menutup usaha mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan statistik bioskop Indonesia yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik, Kabupaten Jember merupakan kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah bioskop yang cukup banyak pada tahun 1970-an hingga 1980-an, yaitu 10 bioskop. Jumlah tersebut lebih banyak dari Malang yang notabene kota besar, yang hanya berjumlah 6 buah bioskop. Peningkatan jumlah menunjukkan tren positif dalam dua dekade sejak awal kemerdekaan dari yang semula hanya 3 buah bioskop menjadi 10 bioskop, bahkan lebih, karena ada beberapa yang tidak tercatat. Menariknya bioskop-bioskop Jember baru itu bermunculan di wilayah yang jauh dari wilayah pusat kota. Fenomena ini tentu saja melawan pendapat umum yang mengatakan bahwa bioskop adalah hiburan masyarakat urban atau kota. Namun begitu memasuki dekade 1990-an, tren bioskop merosot tajam dan bioskop-bioskop desa menjadi yang pertama kali menghilang. Sampai pada awal milenium, jumlah bioskop konvensional di kabupaten Jember hanya tersisa satu buah, dan itu hanya di kota.

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah

¹⁶ *Majalah Film*, "Tarip Pajak Tontonan Perlu Ditinjau Kembali", *Majalah Film* No. 158, 1-15 Agustus 1992

“bagaimanakah perkembangan perbioskopian desa di Kabupaten Jember tahun 1970-2000?”

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengkaji mengenai sejarah perkembangan aktivitas perbioskopian di Kabupaten Jember. Lingkup pembahasan penelitian ini adalah bioskop sebagai modernisasi hiburan masyarakat desa pada tahun 1970 hingga 2000. Berdasarkan lingkup bahasan tersebut, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian sejarah sosial-budaya sebab mengkaji masyarakat dan perubahan sosial dalam bingkai kesejarahan.

Penelitian ini mengambil batas spasial Kabupaten Jember. Kabupaten Jember dipilih karena merupakan salah satu kota di wilayah Jawa bagian timur yang sukses berkat adanya perkebunan. Antara perkebunan dan perbioskopian sebenarnya secara tidak langsung memiliki keterkaitan. Wilayah perkebunan dapat menarik jumlah pendatang sebagai pekerja di perkebunan tersebut atau sebagai pegawai pabrik. Banyaknya jumlah penduduk melahirkan potensi konsumen hiburan, sehingga perusahaan bioskop mulai mendirikan bisnisnya di wilayah perkebunan. Maka dari itu, kemudian muncullah pula bioskop desa. Wilayah-wilayah perkebunan yang memiliki bioskop desa di antaranya kecamatan Kencong, Semboro, Balung, Kalisat, dan Sukowono. Sementara tiga bioskop lain berada di wilayah desa non-perkebunan, di antaranya kecamatan Tanggul dan Ambulu. Keberadaan di bioskop desa di Jember tersebut merupakan fakta dan

fenomena yang menarik yang jarang dijumpai dalam pembahasan mengenai sejarah hiburan modern seperti bioskop.

Secara temporal, kurun waktu yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 1970 hingga tahun 2000. Tahun 1970 dijadikan batas awal penelitian karena pada rentang tahun ini kemajuan bisnis bioskop mulai tampak di Jember. Kemajuan tersebut berkat strategi bisnis pengusaha bioskop dengan melakukan pertunjukan layar tancap atau bioskop keliling. Bioskop keliling merupakan salah satu kegiatan bisnis yang tujuannya untuk memasyarakatkan film hingga ke pelosok-pelosok kampung dan desa. Pada rentang dekade tersebut pula bioskop di wilayah desa juga mengalami pertumbuhan yang pesat.

Sementara tahun 2000 menjadi batas akhir penelitian sebab merupakan akhir dari keberadaan bioskop desa. Pada dekade 1990-an, jumlah bioskop gedung maupun misbar baik di desa maupun di kota mengalami penurunan drastis akibat munculnya kaset video dan televisi. Antusiasme masyarakat Jember menurun terhadap bioskop dan bioskop bukan lagi menjadi tempat hiburan yang utama. Bioskop menjadi sepi dan terpaksa tutup di awal milenium baru. Bioskop Kirana merupakan bioskop desa terakhir yang akhirnya ditutup pada tahun 2000.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan merekonstruksi sejarah perkembangan bioskop desa di Jember pada tahun 1970-2000

- 2) Mendeskripsikan sejarah perkembangan bioskop desa di Jember tahun 1970-2000

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain:

- 1) Dapat memperoleh pengetahuan tentang sejarah film dan bioskop khususnya bioskop di Kabupaten Jember
- 2) Dapat dijadikan referensi kepustakaan bagi penelitian sejenis

1.5. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan kajian pustaka terhadap sumber-sumber berupa buku, dan karya penelitian sejarah dengan tema sejenis. Adapun buku-buku yang dijadikan rujukan penulis di antaranya: *Layar Perak: 90 Tahun Bioskop di Indonesia* karya Haris Jauhari. Buku ini merupakan karya gabungan dari beberapa penulis yang didasarkan pada penelitian tim peneliti dari Universitas Indonesia. Sejarah bioskop dalam buku ini dibagi menjadi beberapa periode antara lain masa kolonial Belanda, masa Kolonial Jepang, masa kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru dan reformasi hingga bioskop berusia 90 tahun. Ada pula karya sejenis dari Johan Tjasmadi dengan judul *100 Tahun Bioskop di Indonesia (1900-2000)*. Dia mengungkapkan tentang perjalanan berdirinya bioskop-bioskop di tanah air secara umum dan penjelasan tentang organisasi Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) sebagai wadah bagi bioskop yang ada di seluruh Indonesia. Kedua buku tersebut merupakan buku penting yang menjadi rujukan banyak peneliti yang mengkaji mengenai sejarah film dan bioskop di Indonesia.

Berikutnya buku Sejarah Film 1900-1950, Bikin Film di Jawa. Buku ini menjadi acuan bagi semua penulis untuk melihat sejarah film dan bioskop di Indonesia. Buku ini ditulis oleh Misbah Yusa Biran, orang yang lama “bergelut” dalam dunia perfilman di Indonesia. Dalam bukunya ia juga menggambarkan asal mula lahirnya film di Indonesia pada masa kolonial Belanda hingga film mendapatkan perhatian masyarakat dan berjaya, oleh sebab itu keberadaan film juga menjadi bisnis bagi orang-orang Tionghoa. Selanjutnya ia juga menggambarkan bagaimana kondisi bioskop dan perfilman di Indonesia setelah masuknya kolonial Jepang hingga berakhirnya masa revolusi. Buku ini relevan dengan penelitian skripsi ini terutama untuk memberikan pandangan tentang gambaran umum perfilman dan perbioskopian di Indonesia.

Buku *Politik Film di Hindia Belanda* karangan M.Sarif Arif. Ia mengungkapkan bagaimana proses lahirnya film dan bioskop di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Buku tersebut juga mengungkapkan bahwa film pada akhirnya mendapatkan *apresiasi* yang bagus dari masyarakat sehingga film mampu menyaingi keberadaan Opera Stambul yang telah lama menjadi hiburan bagi masyarakat pada masa itu. Film dan bioskop ini juga pada akhirnya menjadi penentu strata sosial masyarakat Hindia Belanda, sehingga muncullah berbagai kebijakan Belanda terhadap bioskop dan perfilman di Hindia Belanda

Kemudian ada pula disertasi Dafna Ruppin, mahasiswa doktoral Universiteit Utrecht, Belanda, yang menulis *The Komedi Bioscope: The Emergence of Movie-going in Colonial Indonesia 1896-1914*. Disertasi ini secara luar biasa menjelaskan awal mula kehadiran bioskop di Hindia Belanda.

Penelitian Ruppin melengkapi hal-hal yang tidak terjawab oleh buku-buku babon sejarah film Indonesia sebelumnya. Ruppin menemukan bahwa hadirnya hiburan tersebut di Hindia Belanda diinisiasi oleh pameran keliling para bisnismen bioskop bahkan sebelum tahun 1900, seperti yang diungkapkan para sejarawan film. Ia menjelaskan bahwa orang yang pertama kali mengenalkan film atau foto animasi adalah Dr. Harley yang kala itu melakukan pertunjukan di Semarang.

Ada banyak sekali buku dan penelitian yang menulis mengenai sejarah bioskop di Indonesia, dan tampaknya beberapa buku dan tulisan di atas cukup mewakilinya. Sementara itu, tidak begitu banyak penelitian sejarah mengenai bioskop secara regional terutama yang membahas mengenai bioskop desa. Sedikit penelitian itu di antaranya: tesis Meri Erawati yang berjudul *Bioskop sebagai Sarana Hiburan Masyarakat di Padang Tahun 1950-2000*. Penelitian tersebut tergolong sebagai sejarah sosial yang meneliti tentang perilaku dan gaya hidup masyarakat Padang. Kehadiran bioskop di Padang melahirkan kebiasaan baru dalam masyarakat Padang. Menonton bioskop dianggap sebuah hal yang fenomena dan bergengsi. Tesis milik Meri Erawati ini sangat membantu penulis sebagai rujukan penelitian karena memiliki kerangka konsep dan pendekatan yang hampir sama yaitu sejarah sosial-budaya. Kemudian skripsi Merryana Prasetyo N dengan judul *Hiburan Bioskop di Indonesia 1952-1964*, skripsi Ulwa Humairok Gandes Luwes dengan judul *Sejarah Perkembangan Bioskop di Surakarta Tahun 1979* dan skripsi Ahna Dian Fitriani dengan judul *Perkembangan Bioskop di Kota Semarang Tahun 1980-1998*. Ketiga skripsi, berbeda dengan tesis Meri Erawati, menjabarkan mengenai bioskop sebagai lembaga dan dinamikanya serta efek yang

dihasilkan dari proses kedinamikaan tersebut. Meski berbeda dalam fokus kajian, namun keduanya masih dalam satu tema dan relevan dengan penelitian ini.

Berkaitan dengan bioskop keliling, buku *Acub Zainal, I love the army*, tulisan Hendrowinoto (1998) menggambarkan bagaimana film sebagai bagian dari budaya urban (perkotaan) juga dikenalkan di desa-desa. Buku tersebut memang merupakan sebuah biografi. Tetapi di dalamnya terdapat secuil informasi mengenai perbioskopian keliling yang tidak dapat dilewatkan. Acub Zainal tersebut sendiri ialah ketua PERBIKI dan mendapat julukan ‘Bapak Film Pedesaan’. Ia berjuang bersama PERBIKI dalam mengenalkan film kepada masyarakat desa melalui bisnis layar tancap atau bioskop keliling.

Masih dalam topik bioskop keliling, Heru Erwantoro dalam artikelnya yang berjudul *Bioskop Keliling dan Peranannya dalam Memasyarakatkan Film Dari Masa Ke Masa* juga membahas tentang perkembangan bioskop keliling atau disebut juga layar tancap. Kenyataan bahwa bioskop atau film bukan lagi konsumsi kalangan elite ditunjukkan Erwantoro dalam artikel tersebut. Kebiasaan masyarakat telah berubah dari mencari hiburan di pentas kesenian panggung, kini mereka telah menemukan bioskop sebagai hiburan baru.

1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan untuk memudahkan analisis dan interpretasi sebuah penelitian agar tidak menjadi penelitian yang lemah.¹⁷

Penelitian mengenai “*Bioskop Masuk Desa: Perbioskopian Desa Tahun 1970-*

¹⁷ Taufik Abdullah, et.al, *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Prespektif*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1985), hal. xii

2000” merupakan penelitian yang menjabarkan mengenai aktivitas perbioskopian sebagai bagian dari modernisasi hiburan.

Konsep “bioskop” dalam penelitian ini memiliki dua makna. Pertama, bioskop sebagai sebuah pertunjukan, dan kedua bioskop sebagai tempat pertunjukan. Sementara itu, yang dimaksud “perbioskopian” merupakan segala sesuatu mengenai bioskop, meliputi pengelolaan dan sistem pertunjukan bioskop. Istilah “bioskop” sendiri merupakan kata serapan yang didapat dari bahasa Belanda *bioscoop*, yang berarti “gambar idoeop”. Dalam bahasa Yunani, *bios* berarti hidup, dan *skopos* berarti melihat. Sebab itulah terdapat istilah “nonton bioskop” yang berarti menonton gambar hidup. Bioskop digunakan untuk menyebut gambar hidup, dan bukan “film”. Film sendiri adalah selaput tipis dari seluloid yang digunakan dalam proyeksi gambar.¹⁸ Pengertian film sebagai gambar hidup merupakan bentuk pergeseran makna.

Bioskop sebagai “tempat pemutaran gambar idoeop” menggunakan layar lebar berwarna putih untuk menampilkan proyeksi gambar bergerak. Pemilihan penggunaan istilah “bioskop” dibanding *cinema* dan *movie theater*, yang juga merujuk pada tempat pemutaran gambar hidup, lantaran ‘bioskop’ merupakan istilah yang pertama kali dikenalkan oleh Belanda dan lazim digunakan di Indonesia. Sementara *movie theater*¹⁹ umumnya digunakan di Amerika dan

¹⁸ KBBI daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/film> diakses pada 12 September 2021

¹⁹ *Movie* pada mulanya adalah slang dari *motion picture* atau gambar bergerak. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Hollywood, perusahaan film terbesar di Amerika Serikat. Sementara kata *theater* digunakan untuk menyebut panggung pertunjukan.

*cinema*²⁰ digunakan di Eropa. Istilah *cinema* di Indonesia dapat mengacu pada pengertian yang berhubungan dengan dunia perfilman atau industri film secara luas seperti *cinemas*, *cinematography*, *cinematograph*, dan sebagainya. Sementara *movie theater* cenderung mengacu pada pertunjukan teatrikal dari gambar bergerak.²¹ Dalam penelitian ini bioskop sebagai tempat pertunjukan terbagi menjadi dua jenis yaitu bioskop permanen dan bioskop semi-permanen. Bioskop permanen merupakan jenis bioskop yang mempertunjukkan gambar hidup di dalam sebuah gedung yang permanen. Sementara bioskop semi-permanen adalah jenis bioskop yang mempertunjukkan gambar hidup pada suatu lokasi yang sewaktu-waktu dapat berpindah tempat, biasanya di lapangan terbuka. Masyarakat Jember dalam penelitian ini menyebut bioskop permanen dengan sebutan bioskop gedung, sementara bioskop semi-permanen disebut bioskop misbar.

Bioskop merupakan bagian dari modernisasi hiburan. Modernisasi dalam konsep sosiologi diartikan sebagai perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan tradisional menuju modern. Koentjaraningrat menyatakan bahwa modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang.²² Artinya, bioskop sebagai hiburan modern dalam pertunjukannya sudah tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional melainkan menggunakan teknologi paling mutakhir. Bioskop sebagai media gambar bergerak merupakan

²⁰ Istilah *cinema* merupakan kependekan dari *cinematographie*, teknologi proyeksi gambar menjadi bergerak yang ditemukan oleh kakak-beradik Perancis, Lumière bersaudara, di tahun 1880an.

²¹ Michael Deni Yudistira, *Landasan Konseptual Bioskop Komunitas di Sleman D.I. Yogyakarta*, Skripsi (Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015)

²² Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal.

kemajuan yang luar biasa. Kepopuleran bioskop segera diamini oleh masyarakat di seluruh dunia pada abad ke-20. Bioskop umumnya dijumpai di kota-kota, sebab kotalah tempat lahir modernisasi. Namun di Jember, tidak hanya di kota, bioskop juga dijumpai di desa, sehingga muncullah konsep “bioskop desa”. Dalam penelitian ini, yang dimaksud bioskop desa adalah bioskop-bioskop yang berdiri di desa-desa di Kabupaten Jember.

Tidak semua desa di kabupaten Jember memiliki gedung bioskop atau bioskop permanen. Desa di Jember yang memiliki gedung bioskop merupakan desa yang berada di ibukota kecamatan. Desa tersebut tergolong ke dalam desa perkotaan. Desa perkotaan adalah suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria wilayah perkotaan.²³ Adapun salah satu kriteria wilayah perkotaan yang dimaksud BPS adalah salah satunya bioskop. Di Kabupaten Jember, keberadaan desa perkotaan dapat dijumpai di beberapa kecamatan yang memiliki penduduk yang padat. Kepadatan penduduk pada tingkat kecamatan misalnya di Kencong, Umbulsari dan Gumukmas berkepadatan lebih dari 1.000 jiwa per km².²⁴ Keberadaan bioskop desa pada tahun 1970-2000 di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa di kabupaten tersebut sudah terdapat desa perkotaan. Sebagai hiburan komersial, pengusaha-pengusaha bioskop menyadari keberadaan desa perkotaan di Jember sebagai wilayah yang potensial untuk pasar konsumennya. Masyarakat desa perkotaan yang bertopang pada ekonomi perkebunan dan pertokoan dapat menjadi konsumen tetap bisnis mereka.

²³ Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 37 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia., Pasal 1 Ayat 1.

²⁴ Nawayanto, *op.cit.*

Desa yang memiliki gedung pertunjukan seperti gedung GNI atau gedung pertunjukan lain disewa untuk usaha bioskop permanen. Sementara desa-desa pedalaman atau desa-desa yang tidak memiliki gedung pertunjukan didirikan bioskop-bioskop misbar atau layar tancap.

Bioskop menjadi hiburan yang penting dan trendi baik di kota maupun di desa kala itu. Berkaitan dengan konsep hiburan, secara sederhana hiburan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyenangkan hati, penghilang penat dan pelipur kesedihan. Sifat hiburan sangatlah abstrak dan tidak terbatas. Hiburan dapat berupa apa saja, berada di mana saja dan kapan saja. Kebutuhan setiap orang terhadap hiburan pun berbeda-beda. Umumnya hiburan dapat berupa permainan, musik, sandiwara, film, buku, olahraga dan sebagainya. Ada pula yang menghibur diri dengan makan sepuasnya. Bahkan bagi sebagian kelompok, bekerja secara terus-menerus adalah hiburan daripada hanya berdiam diri.

Hiburan juga menjadi elemen penting dan penanda simbol kelas dalam masyarakat.²⁵ Kelas sosial menurut A Pitirim Sorokin dapat terbentuk secara tidak maupun sengaja. Ukuran yang membentuk kelas sosial antara lain kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan kepandaian.²⁶ Pada masa Hindia Belanda kelas-kelas sosial dibentuk secara rasial dan diskriminatif. Belanda membagi kelas sosial menjadi tiga kelas. Kelas I diisi oleh kalangan mereka sendiri, kelompok kulit putih dan bangsa Eropa yang lain. Kelas II terdiri dari kelompok Asia dan Timur Tengah yang biasanya mempunyai peranan penting dalam ekonomi perdagangan.

²⁵ William L. Rivers dan Jay W. Jensen, *Media Massa dan Masyarakat Modern* (Jakarta: Kencana, 2008), hal 287

²⁶ Muhammad Anwar, *Pegangan Sosiologi*, (Bandung: Armico, 1994), hal. 14-15.

Kelas III, kelas yang paling rendah adalah kelompok yang disebut *inlander* atau pribumi, penduduk lokal Indonesia. Pada awal perkembangannya di Hindia Belanda, bioskop hanya dapat dinikmati oleh kalangan kelas I dan II karena harga karcisnya yang mahal dan mustahil sanggup dibayar oleh kelas paling rendah.

Pada era-era berikutnya, etnisitas dan rasial tidak lagi menjadi penentu kelas sosial, melainkan kekayaan, kehormatan, kekuasaan dan kepandaian. Kelas-kelas sosial baru tersebut pun turut mempengaruhi munculnya kelas-kelas pada bioskop. Perbedaan kelas bioskop ditentukan oleh kualitas proyeksi gambar, tempat duduk, kondisi ruangan, jenis film yang diputar dan tentu saja harga tiket yang ditawarkan. Perbedaan kelas dalam bioskop ini turut menunjukkan status dan gengsi penontonnya. Penonton yang lebih kaya atau mengutamakan gengsi cenderung memilih bioskop kelas A yang kondisinya lebih bersih, nyaman, dan tenang. Pemandangan tersebut hanya dapat dijumpai di kota, sebab di desa bioskop tidak memiliki variasi kelas. Tidak adanya variasi kelas pada bioskop desa menunjukkan bahwa bioskop desa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah memiliki lima tahapan, yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber atau verifikasi, analisis dan interpretasi, dan penulisan sejarah.²⁷ Pemilihan topik penelitian yang berkaitan dengan bioskop ini dipilih berdasarkan kedekatan emosional, kegemaran peneliti

²⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001) hal. 69

akan film dan ketertarikan peneliti terhadap perkembangan bioskop, serta kedekatan intelektual melalui penelusuran topik dan pengumpulan sumber.

Dalam proses pengumpulan sumber, ada tiga jenis sumber yang digunakan yaitu sumber tertulis, sumber berupa gambar dan sumber lisan. Sumber tertulis didapatkan melalui studi kepustakaan pada buku-buku rujukan milik pribadi, buku milik Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, buku elektronik Google, serta koleksi digital Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sumber arsip seperti produk hukum, undang-undang dan laporan pajak tontonan didapatkan dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD Kabupaten Jember. Statistika Bioskop Indonesia dan sumber berupa artikel Majalah Film yang didapatkan dari Perpustakaan Sinematek Indonesia. Ada pula pustaka dari surat-surat kabar lama koleksi digital milik situs *delpher.nl*, Perpustakaan Nasional RI yang diakses secara daring. Surat kabar Jawa Pos yang diakses dari Perpustakaan Medayu Agung Surabaya. Sumber berupa gambar didapatkan dari koleksi Antonius, Ian Rakhmadi dan koleksi pribadi. Sumber-sumber lisan dari hasil wawancara narasumber pertama pelaku sejarah, dan narasumber kedua yang pernah melakukan wawancara dengan pelaku sejarah. Narasumber tersebut antara lain: Hidayat, Aslan, Budi dan Sunaryanto yang merupakan mantan pegawai bioskop. Ida, Arif, R. Kurniawan, M. Sukardi, yang pernah menonton film di bioskop desa. Elfira Arisanti yang pernah memiliki ketertarikan terhadap bioskop Jember dan pernah melakukan wawancara dan riset mengenai bioskop pada tahun 2013. Sri merupakan mantan pegawai PG Semboro, sehingga didapatkan informasi darinya mengenai bioskop Candra di kompleks PG Semboro.

Sumber-sumber yang sudah terkumpul tersebut di atas, kemudian harus melalui tahapan verifikasi atau kritik sumber. Tahapan ini dilakukan untuk menguji dua hal: otentisitas dan kredibilitas.²⁸ Otentisitas berkaitan dengan keaslian sumber. Uji ini dilakukan pada sumber tertulis dan gambar. Sedangkan kredibilitas berkaitan dengan kebenaran isi atau konten dan konsistensinya. Uji ini dilakukan pada semua sumber terutama sumber lisan. Verifikasi sumber lisan menjadi sangat penting karena besar kemungkinan bagi seorang narasumber untuk lupa, berlaku subjektif, melebih-lebihkan atau bahkan tidak jujur.

Setelah melalui tahapan verifikasi, sumber-sumber harus diinterpretasikan. Fakta-fakta sejarah yang sudah dikumpulkan tidak dapat berbicara kecuali harus dirangkai satu sama lain dan diinterpretasi sehingga membentuk cerita peristiwa sejarah. Tahapan ini dapat disebut sebagai analisis sejarah. Prosesnya dilakukan dengan cara menguraikan fakta satu per satu sehingga memperluas perspektif fakta itu, kemudian menarik kesimpulan.²⁹

Tahapan terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Hasil dari rangkaian kesimpulan pada tahap interpretasi harus diwujudkan dalam bentuk tulisan sejarah. Pada tahapan ini dibutuhkan kemampuan seorang sejarawan untuk melakukan deskripsi dengan baik, narasi, analisis secara kritis, penggunaan konsep-konsep serta hipotesis yang bijak untuk menghasilkan penulisan sejarah yang utuh.

²⁸ *Ibid*, hal. 80

²⁹ M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), hal. 226

1.8. Sistematika Penulisan

Bab I berisi latar belakang penelitian terkait judul *Bioskop Masuk Desa: Perbioskopon Perdesaan di Kabupaten Jember Tahun 1970-2000*. Kemudian disampaikan pula rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi pembahasan mengenai alternatif hiburan masyarakat di Kabupaten Jember. Bab ini akan dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama memulai pembahasan mengenai hiburan masyarakat Jember. Hal ini perlu dijelaskan sebab hiburan masyarakat Jember tidak hanya bioskop. Seni pertunjukan panggung tradisional merupakan hiburan utama. Seni pertunjukan panggung itu di antaranya wayang kulit, wayang orang, reog, can-macanan kaduk, janger dan lain-lain. Hiburan-hiburan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti kapan kemunculannya karena sudah menjadi bagian dari masyarakat Jember sejak dahulu kala. Pada awal abad ke-20 muncul hiburan baru modern yaitu bioskop yang akan dijelaskan pada subbab selanjutnya. Pada subbab kedua ini akan dijabarkan mengenai awal mula perkembangan bioskop di Jember. Bioskop di Jember telah ada sejak tahun 1913, namun hiburan ini masih terbatas dan masih dikelola oleh orang Eropa. Pasca kemerdekaan gedung bioskop warisan Belanda telah dinasionalisasi dan kemudian disewakan kepada orang Tionghoa. Bioskop juga akhirnya dapat dinikmati oleh semua kalangan. Pada subbab kedua ini untuk mempermudah pembahasan dibagi ke dalam sub subbab berdasarkan periodisasi: Hindia Belanda, Jepang dan Pasca Kemerdekaan.

Bab III sebagai pembahasan utama dari penelitian ini, terdiri dari enam subbab. Subbab pertama membahas jenis-jenis bioskop di Jember tahun 1970-2000. Bioskop secara umum dibedakan menjadi tiga klasemen (A, B, C) berdasarkan film yang diputar dan harga tanda masuk yang dibebankan. Bioskop juga dibedakan berdasarkan lokasinya, bioskop perkotaan dan bioskop perdesaan. Bioskop perdesaan secara lebih rinci dijelaskan pada subbab kedua. Pemisahan subbab ini dengan alasan bioskop perdesaan merupakan subjek utama dalam penelitian ini. Subbab ini memiliki anak subbab yang menjelaskan mengenai bioskop misbar. Selanjutnya pada subbab ketiga membahas mengenai pertunjukan bioskop. Subbab ini menjabarkan mengenai jadwal pertunjukan, teknik pertunjukan, serta realitas yang terjadi saat pertunjukan bioskop berlangsung. Subbab keempat membahas mengenai film-film yang diputar di bioskop-bioskop di Jember. Subbab kelima membahas mengenai tanda masuk dan tarif bioskop. Subbab terakhir, subbab keenam membahas mengenai kemunduran bioskop perdesaan di Jember. Bioskop kehilangan popularitasnya di Jember utamanya disebabkan banyaknya masyarakat yang memiliki televisi serta teknologi kaset yang menyimpan rekaman film sehingga dapat diputar di rumah tanpa harus pergi ke bioskop. Pendapatan dari tanda masuk penonton yang tidak seberapa itu lama-lama tidak dapat menutup beban pengeluaran, seperti upah pekerja dan pajak, sehingga bioskop terpaksa harus ditutup.

Bab IV berisi jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang diajukan dalam bab I. Pada bab ini akan disampaikan hasil atau kesimpulan dari persoalan yang dikemukakan dalam penulisan ini.